

PENGARUH UKURAN LEGISLATIF, TINGKAT KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH, DAN TINGKAT KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP RASIO EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMBAGSEL

Oleh :

**Anisa Musdirohmah,
Sunardi,
Yulian Sahri**

Universitas Muhammadiyah Palembang
Anisamusdirohmah.xiipal@gmail.com

Article Info

Article History :

Received 16 Agustus - 2022

Accepted 25 Agustus - 2022

Available Online

30 September - 2022

Abstract

This study aims to determine the effect of the size of the legislature, the level of dependence of the local government, and the level of wealth of the local government on the Effectiveness Ratio of the Financial Performance of the Regency / City Government of SUMBAGSEL Province. The type of research used in this research is associative research. The population in this study was 60 regencies/cities in the provinces of South Sumatra, Lampung, Bengkulu, Jambi, and Bangka Belitung Islands, with the sample method determined was the saturated sample. The data used is secondary data in the form of LKPD in 2018-2020. The data collection method in this research is the documentation method. The data analysis method used is descriptive statistical analysis method, classical assumption test and multiple linear regression, as well as data processing in this research using SPSS 26.0 (Statistical Product and Service Solution) statistical computer program. The results of this study can be concluded that partially (t test) shows that the size of the legislature and the level of dependence of the local government have no effect on the ratio of the effectiveness of the financial performance of the district/city government of SUMBAGSEL Province, while the level of local government wealth has a significant effect on the ratio of the effectiveness of the financial performance of the district/city government. city of SUMBAGSEL Province

Keyword :

Legislative size, local government dependency level, local government wealth level and the effectiveness ratio of local government financial performance

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah (Pemda) dituntut untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan agar terciptanya pemerintah yang bersih sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Salah satu upaya konkrit yang dilakukan adalah dengan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar akuntansi sangat penting

diperlukan sebagai pedoman dan petunjuk dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai PP nomor 71 Tahun 2010.

Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri (Sujarweni, 2015:231). Diterapkannya

kebijakan otonomi pada suatu daerah menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat oleh sebab itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah memerlukan ukuran penilaian yang lebih kompleks karena variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah beraneka ragam dan menggunakan berbagai metode pengukuran sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dapat diukur hanya dengan menggunakan satu variabel (Mahsun dkk., 2007:165).

Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Dengan demikian di dalam pemerintahan tuntutan terhadap kinerja dan akuntabilitas yang tinggi berujung pada pengukuran kinerja pemerintah. Tujuan dari pengukuran tersebut untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah diuntut mampu membangun ukuran kinerja yang baik.

Ukuran legislatif memiliki arti banyaknya jumlah anggota legislatif yang bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat digunakan dengan baik (Novianti et al, 2016). Kinerja yang baik dalam suatu pemerintah daerah dapat dilihat dari jumlah anggota legislatif yang terpilih. Banyaknya jumlah anggota DPRD

diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam proses peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa DAU

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah dapat diturunkan dengan penggunaan Pendapatan Asli Daerah untuk mendanai pembangunan (Nugroho, 2012).

Tingkat kekayaan daerah memperlihatkan pendapatan yang didapat dari daerah itu sendiri dan diperlihatkan dari PAD daerah tersebut (Sedyaningsih 2015). Peningkatan PAD akan memperlihatkan peningkatan dari pertumbuhan ekonomi dan akan berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang diperlihatkan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah (Noviyanti dan Kiswanti 2016).

Berdasarkan fenomena, literatur yang digunakan dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dikemukakan sebelumnya, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Ukuran Legislatif, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Sari, 2016). Menurut Mardiasmo (2016:121) Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu rasio efektivitas.

Ukuran Legislatif

Ukuran legislatif memiliki arti banyaknya jumlah anggota legislatif yang bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat digunakan dengan baik (Novianti et al, 2016).

Untuk mengetahui ukuran legislatif yaitu dilihat dari banyaknya anggota DPRD. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 155 menjelaskan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang paling banyak 50 (lima puluh) orang.

Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dapat diukur dengan besarnya pendapatan transfer atau dana perimbangan yang diterima (Noviyanti dan Kiswanto, 2016).

Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah

Hendri Maduki (2019:157) Tingkat kekayaan pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) . Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2011 Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif, yaitu untuk mengetahui pengaruh ukuran legislatif, tingkat ketergantungan pemerintah daerah dan tingkat kekayaan pemerintah daerah terhadap rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah.

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi SUMBAGSEL yaitu sebanyak 60 Kabupaten/

Kota yang terdiri dari tahun 2018, 2019, dan 2020.

Data Yang Diperlukan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa jumlah anggota DPRD untuk variabel ukuran legislatif yang diperoleh dari situs web resmi bps.go.id, serta data laporan keuangan pemerintah daerah di situs djpk.go.id.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dekumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data terkait Jumlah Anggota DPRD, dan data terkait Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi SUMBAGSEL.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokolerasi, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, dan uji secara parsial (uji t).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Legislatif	180	25,00	50,00	34,6667	8,38328
Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	180	,10	,66	,4724	,09029
Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah	180	10,29	12,03	10,9682	,31871
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	180	,27	1,46	,9459	,21466
Valid N (listwise)	180				

Sumber: Data yang diolah, SPSS 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas diperoleh nilai statistik diskriptif sebagaiberikut:

- 1) Variabel Ukuran Legislatif dengan nilai n = 180 memiliki nilai *mean* sebesar 34,6667, nilai *standard deviation* sebesar 8,38328, nilai *minimum* sebesar 25,00, dan nilai *maximum* sebesar 50,00.
- 2) Variabel Tingkat Ketergantungan dengan

nilai $n = 180$ memiliki nilai *mean* sebesar 0,4724, nilai *standard deviation* sebesar 0,09029, nilai *minimum* sebesar 0,10, dan nilai *maximum* sebesar 0,66.

- 3) Variabel Tingkat Kekayaan dengan nilai $n = 180$ memiliki nilai *mean* sebesar 10,9682, nilai *standard deviation* sebesar 0,31871, nilai *minimum* sebesar 10,29, dan nilai *maximum* sebesar 12,03.
- 4) Variabel kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai $n = 180$ memiliki nilai *mean* sebesar 0,9459, nilai *standard deviation* sebesar 0,21466, nilai *minimum* sebesar 0,27, dan nilai *maximum* sebesar 1,46.

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized Residual	
N		164
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,18816646
Most Extreme Differences	Absolute	,041
	Positive	,041
	Negative	-,037
Test Statistic		,041
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data yang diolah, SPSS 2022

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,358a	,128	,112	,18992	1,972
a. Predictors: (Constant), Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Ukuran Legislatif					
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah					

Sumber : Data yang diolah, SPSS 2022

Berdasarkan hasil tabel diketahui nilai DW (d) yaitu 1,972 selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel *Durbin-Watson* dimana jumlah sampel $N = 180$ dan jumlah $K = 3$, maka diperoleh dU sebesar 1,7901 dan $4-dU$ sebesar 2,2099. Sehingga dapat disimpulkan bahwa $1,7901 < 1,972 < 2,2099$ artinya $du < dw < 4-dU$ maka tidak terjadi autokorelasi.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan $0,200 > 0,05$ maka dapat

disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi Normal.

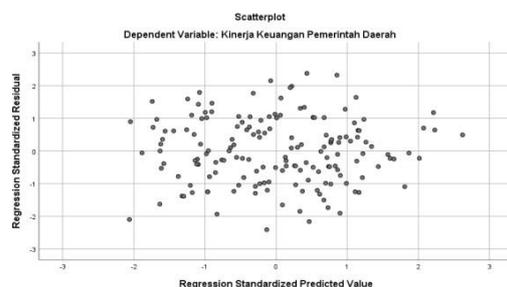
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Ukuran Legislatif	,720	1,389
	Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	,856	1,168
	Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah	,721	1,387
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah			

Sumber : Data yang diolah, SPSS 2022

Pada tabel di atas , diketahui hasil uji multikolinieritas, setiap model pada riset ini memiliki nilai *tolerance* $> 0,100$ dan nilai VIF < 10 yang artinya pada riset ini tidak terdapat multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Scatterplot



Sumber : Data yang diolah, SPSS 2022

Dari gambar *Scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar merata dan jauh dari garis diagonal 0 tidak ada yang terlalu berdekatan antara satu dengan yang lain. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hasil uji heteroskedastisitas layak dipakai.

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,358a	,128	,112	,18992	1,972
a. Predictors: (Constant), Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Ukuran Legislatif					
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah					

Sumber : Data yang diolah, SPSS 2022

Berdasarkan hasil tabel diketahui nilai DW (d) yaitu 1,972 selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel *Durbin-Watson* dimana jumlah sampel $N = 180$ dan jumlah $K = 3$, maka diperoleh dU sebesar 1,7901 dan $4-dU$ sebesar 2,2099. Sehingga dapat disimpulkan bahwa $1,7901 < 1,972 < 2,2099$ artinya $du < dw < 4-dU$ maka tidak terjadi autokorelasi.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan $0,200 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi Normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

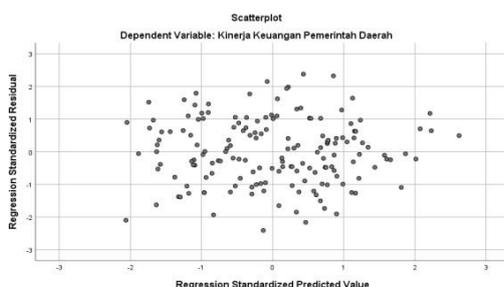
Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Ukuran Legislatif	,720	1,389
	Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	,856	1,168
	Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah	,721	1,387

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Data yang diolah, SPSS 2022

Pada tabel di atas , diketahui hasil uji multikolinieritas, setiap model pada riset ini memiliki nilai *tolerance* $> 0,100$ dan nilai VIF < 10 yang artinya pada riset ini tidak terdapat multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Scatterplot



Sumber : Data yang diolah, SPSS 2022

Dari gambar *Scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar merata dan jauh dari garis diagonal 0 tidak ada yang terlalu berdekatan antara satu dengan yang lain. Sehingga, dapat

disimpulkan bahwa hasil uji heteroskedastisitas layak dipakai.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,922	,736		2,610	,010
	Ukuran Legislatif	-,007	,002	-,254	-2,925	,064
	Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	-,251	,252	-,079	-,994	,322
	Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah	,295	,067	,385	4,428	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Data yang diolah, SPSS 2022

Dari tabel hasil uji regresi linear berganda tersebut dapat ditulis persamaan regresinya sebagai berikut: $KKPD = a + \beta_1UL + \beta_2TK + \beta_3TKPD + e$
 $KKPD = 1,922 - 0,007X_1 - 0,251X_2 + 0,295X_3 + e$

Berdasarkan hasil perhitungan tabel IV.11 melalui program SPSS diperoleh hasil uji regresi linear berganda sebagai berikut :

- 1) Konstanta (a) sebesar 1,922 bernilai positif artinya jika ukuran legislatif, tingkat ketergantungan pemerintah daerah dan tingkat kekayaan pemerintah daerah bernilai nol maka kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi SUMBAGSEL sebesar 1,922.
- 2) Nilai koefisien regresi Ukuran Legislatif (X_1) sebesar 0,007, hasil ini menunjukkan bahwa apabila ukuran legislatif meningkat sebesar 1 satuan maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,007 dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap, begitu juga sebaliknya.
- 3) Nilai koefisien regresi tingkat ketergantungan (X_2) sebesar 0,251, hasil ini menunjukkan bahwa apabila ukuran legislatif meningkat sebesar 1 satuan maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,251 dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap, begitu juga sebaliknya.

- 4) Nilai koefisien regresi tingkat kekayaan pemerintah daerah (X3) sebesar 0,295, hasil ini menunjukkan bahwa apabila ukuran legislatif meningkat sebesar 1 satuan maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,295 dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap, begitu juga sebaliknya.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,358 ^a	,128	,112	1,18992	1,972

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Ukuran Legislatif
 b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Data yang diolah, SPSS 2022

Berdasarkan tabel IV.12 diperoleh Adjusted R Square sebesar 0,112 hasil ini menunjukkan terdapat pengaruh variabel X1,X2,X3 terhadap Y sebesar 0,112 atau 11,2% sedangkan sisanya 88,8 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti *Good governance*, Akuntabilitas, Pengawasan internal, Pengendalian internal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,922	,736		2,610	,010
	Ukuran Legislatif	-,007	,002	-,254	-2,925	,064
	Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	-,251	,252	-,079	-,994	,322
	Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah	,295	,067	,385	4,428	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Data yang diolah, SPSS 2022

Nilai ttabel diperoleh dengan derajat bebas (db) = n-k-1 yaitu (db) = 180-3-1 = 176 dan tingkat signifikan 5%. Hasil yang diperoleh nilai ttabel sebesar 1,65356. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa :

- 1) Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel ukuran legislatif memiliki thitung

< t tabel yaitu $-2,925 < 1,65356$, dengan nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditentukan yaitu $0,064 > 0,05$ maka H01 diterima dan Ha1 ditolak. Hal ini berarti bahwa ukuran legislatif tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Variabel tingkat ketergantungan memiliki thitung < t tabel yaitu $-994 < 1,65356$ dengan nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan yang ditentukan yaitu $0,322 > 0,05$ maka H02 diterima dan Ha2 ditolak. Hal ini berarti bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

- 1) Pengaruh Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Variabel tingkat ketergantungan memiliki thitung > t tabel yaitu $4,428 > 1,65356$ dengan nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan yang ditentukan yaitu $0,000 < 0,05$ maka H03 ditolak dan Ha3 diterima. Hal ini berarti bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

- 2) Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Variabel tingkat ketergantungan memiliki thitung < t tabel yaitu $-994 < 1,65356$ dengan nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan yang ditentukan yaitu $0,322 > 0,05$ maka H02 diterima dan Ha2 ditolak. Hal ini berarti bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

- 3) Pengaruh Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Variabel tingkat ketergantungan memiliki thitung > t tabel yaitu $4,428 > 1,65356$ dengan nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan yang ditentukan yaitu $0,000 < 0,05$ maka H03 ditolak dan Ha3 diterima. Hal ini berarti bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh signifikan

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pembahasan Hasil Penelitian

a. Uji Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan nilai t tabel lebih besar dari t hitung sehingga H_0 di terima dan H_a di tolak dan nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 yang artinya ukuran legislatif tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Kabupaten/Kota Provinsi di SUMBAGSEL memiliki jumlah anggota legislatif yang berbeda-beda. Namun, tetap memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu anggota legislatif paling sedikit 20 orang dan paling banyak 50 orang. Tetapi, pada faktanya berapapun jumlah anggota legislatif tidak akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan bukan kuantitas atau besarnya jumlah anggota legislatif yang menjamin meningkatnya kinerja pemerintah daerah, namun yang penting adalah kualitas dari pihak legislatif itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari fungsi DPRD yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Serta tugas DPRD seperti membahas dan membentuk persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota, dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nyayu Miftahul Ilmiyyah, dkk (2017) yaitu pengaruh opini audit, ukuran legislatif, *Intergovernmental Revenue*, *size*, *leverage* dan klaster kemampuan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hasil dari penelitiannya bahwa variabel opini audit, ukuran legislatif, *size*, *leverage*, dan klaster kemampuan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi variabel *Intergovernmental Revenue* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga penulis

menyimpulkan bahwa variabel ukuran legislatif tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Uji Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Rasio Efektivitas Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan nilai t tabel lebih besar dari t hitung sehingga H_0 di terima dan H_a di tolak dan nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 yang artinya tingkat ketergantungan tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat juga dapat dilihat dari berapa besar DAU yang di terima (Marfiana dan Kurniasih 2013). Berdasarkan Tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dapat dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Umum. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat akan memantau pelaksanaan alokasi DAU sehingga dapat mendorong pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Untuk itu hubungan tingkat ketergantungan pada pusat dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pusat maka akan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Natoen *et al* (2019) dengan sampel Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2013-2017 dan oleh Aulia Rizka Kusuma (2017) dengan sampel yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa variabel tingkat

ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah

c. Uji Pengaruh Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Rasio Efektivitas

Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan nilai t tabel lebih kecil dari thitung sehingga H03 di tolak dan Ha3 di terima dan nilai signifikan nya lebih kecil dari 0,05 yang artinya tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat kekayaan daerah dapat dilihat dari pendapatan asli daerah tersebut. Peningkatan kinerja keuangan dilihat dengan adanya peningkatan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat (Ajani, Akram dan Handajani 2016). Untuk itu, perlu diupayakan peningkatan sumber daya daerah sendiri dengan meningkatkan PAD. Pendapatan asli daerah merupakan sumber utama pembiayaan daerah yang bersumber dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil kekayaan daerah yang terpisah, dan PAD lain yang sah. Dengan penerimaan yang baik maka akan meningkatkan investasi terhadap daerah tersebut dan akan meningkatkan pelayanan publik (Marfiana dan Kurniasih 2013).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuningsih (2016) ditemukan fakta empiris berupa kekayaan daerah berpengaruh pada kinerja keuangan daerah karena dengan pertumbuhan yang positif akan meningkatkan investasi pada daerah tersebut dan akan meningkatkan infrastruktur untuk peningkatan PAD daerah. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa variabel tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh

ukuran legislatif, tingkat ketergantungan pemerintah daerah dan tingkat kekayaan pemerintah daerah terhadap rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ukuran Legislatif tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi SUMBAGSEL (Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung).
2. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi SUMBAGSEL (Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung).
3. Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi SUMBAGSEL (Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung).

6. REFERENSI

- Abdul Halim (2008). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangany Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ayuningsih, Diyah. (2016). *Pengaruh Size, Wealth, Leverage, Belanja Daerah dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Di akses 22 November 2021, Dari https://sumsel.bps.go.id/publication/2017/08/12/5b5a8993710ce0d0e356fdcf/provins_i-sumatera-selatan-dalam-angka-2018.html

- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2018. Diakses 5 Desember 2021, dari [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/da ta/apbd](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/da%20ta/apbd).
- Fakhry Zamzam (2019). *Good Governance Sekretariat DPRD*. Yogyakarta :Deepublish.
- Fitriya Fauzi, Abdul Basyith Dencik, Diah Isnaini Asiati (2019). *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi Aplikasi SPSS dan Eviews untuk Teknik Analisis Data*. Jakarta : Salemba Empat.
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Kusuma, A. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(1).
- Mahmudi (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta : ANDI.
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 3(1).
- Mohammad Mahsun (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Novianti et al. 2016. *Pengaruh Ukuran Legislatif, Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta. E-Jurnal Bung Hatta Volume 9, No 1.
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto, K. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Prianka, A. (2015). *Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa Tahun Anggaran 2012-2013)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Sedyaningsih, P., & Zaky, A. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009– 2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*.
- Sesotyanyngtyas, M. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting analysis journal*, 1(1).
- Slamet Riyanto & Aglis Andhita Hatmawan (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Penelitian di bidang manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta : Deepublish.
- Suci Ramadhani (2017). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan Dan Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Periode 2011-2015)*. Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian (Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan.
- Sumarjo, Hendro (2010) *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Other thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Uma Sekaran & Roger Bougie (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis. Buku 2 Edisi enam*. Jakarta : Salemba Empat.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- V. Wiratna Sujarweni (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta Pustaka